



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ILMU UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Dinis Putra Hulu

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: huludinisputra@gmail.com

Abstract

Pancasila is the foundation of the Indonesian state, playing a role in shaping national and state life. As the ideology of Indonesia, Pancasila not only serves as a guideline but also as a scientific foundation for creating social justice, particularly in Indonesia. This article aims to analyze how Pancasila, especially its fifth principle, can serve as a guideline for realizing social justice in Indonesia. Using a qualitative approach, this study explores the values of Pancasila in the context of economics, education, health, and sustainable development. The results of the study indicate that the fifth principle, "Social Justice for All Indonesians," embodies principles of justice that can be applied to public policy, equitable resource distribution, and the elimination of social inequalities among the people. Moreover, Pancasila serves as a moral foundation for law enforcement that protects the rights of all citizens without discrimination among groups and supports the development of science oriented toward equitable and wise welfare. The integration of Pancasila's moral values into various fields can create harmony between scientific development and the needs of Indonesian society. However, the successful implementation of Pancasila as a scientific foundation for realizing social justice requires the commitment of all national elements to use it as a guide in decision-making and policymaking. By making Pancasila the foundation and guideline for building a scientific paradigm, it is hoped that a fair, prosperous, and civilized society can be achieved.

Keywords: Pancasila, the foundation of science, social justice.

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berperan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman tetapi juga landasan keilmuan dalam menciptakan keadilan sosial khususnya di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila khususnya sila yang kelima, bisa dijadikan pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian mencerminkan bahwa sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menunjukkan prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik, sumber daya yang adil, dan penghapusan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Selain itu, Pancasila menjadi fondasi moral dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak seluruh rakyat tanpa diskriminasi antar golongan, serta menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan yang adil dan bijaksana. Integrasi nilai-nilai moral Pancasila ke dalam berbagai bidang dapat menciptakan harmoni antara pengembangan keilmuan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan penerapan Pancasila sebagai landasan ilmu dalam mewujudkan keadilan sosial memerlukan komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam membangun paradigma ilmu pengetahuan, diharapkan dapat tercipta tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Kata kunci: pancasila, landasan ilmu, keadilan sosial.



Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar hukum memberikan landasan filosofis dan ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan, di mana kesenjangan sosial dan ketidakadilan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekaligus ideologi negara Indonesia menjadi pedoman masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman hidup yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila mempunyai kedudukan yang fundamental dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kesejahteraan seluruh elemen bangsa Indonesia. Pancasila juga mempunyai potensi besar sebagai landasan ilmu yang bisa diterapkan didalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan nilai-nilai moral yang ada di dalamnya, Pancasila dapat memberikan arah yang baik dan jelas untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadaban, berkeadilan, dan sejahtera.

Sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini menegaskan bahwa pentingnya prinsip keadilan dalam sumber daya, akses terhadap layanan, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial, baik itu Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang menjadi masalah yang memerlukan solusi berbasis nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam konteks ini, sila kelima tidak hanya menjadi cita-cita yang harus diwujudkan, tetapi juga harus dilaksanakan menjadi pedoman yang konkret dalam kebijakan publik dan praktik pembangunan khususnya didalam masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sering kali kurang memperhatikan aspek moral serta kebutuhan sosial. Hal ini mendorong perlunya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam paradigma ilmu pengetahuan, sehingga pengembangan ilmu tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi semata dan keuntungan suatu kelompok, tetapi juga pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ilmu, Indonesia dapat membangun kerangka relevan dengan kondisi masyarakatnya untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia (Ningsih, 2023).

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tercermin dalam sila kelima. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik, tetapi juga memberikan pedoman moral dan etis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan ekonomi dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat.

Beberapa penelitian dan artikel yang telah dipublikasikan menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi, dapat menciptakan sistem yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (2023), diungkapkan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil dan meminimalisir ketimpangan sosial-ekonomi (Hadi, 2023). Selain itu, artikel yang diterbitkan di Jurnal Pembangunan Sosial (2022) menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam



pembentukan kebijakan yang memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial, yang sejalan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila (Sutanto, 2022).

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggali dia sumber yaitu kajian pustaka dan telaah undang-undang. Kajian pustaka melibatkan literatur tentang peran Pancasila dalam nilai moral dikalangan masyarakat dan negara, terutama di bidang ekonomi. Literatur tersebut mencakup buku, jurnal, AI dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, telaah undang-undang dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang berkaitan dengan keadilan sosial. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Menurut Kaelan (2007), Pancasila adalah panduan moral bangsa yang berfungsi sebagai pedoman etis untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan penting untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Mubyarto (2000) memperkenalkan konsep Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Konsep ini menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Sistem ekonomi berbasis Pancasila menawarkan pendekatan yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, dengan menekankan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan arah bagi pengelolaan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi ciri khas Pancasila. Pasal 34 melengkapi dengan menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pasal-pasal ini sering terkendala oleh berbagai hambatan, seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan ketimpangan distribusi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi belum optimal.

Pembahasan

Artikel ini mengangkat pentingnya Pancasila sebagai landasan ilmu, khususnya dalam membangun sistem yang adil. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan asas kekeluargaan, menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

Menurut Itasari (2024), tantangan dalam reformasi hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia sangatlah kompleks dan meliputi beberapa aspek yang harus diatasi secara menyeluruh. Reformasi hukum untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan menyeluruh. Salah satu masalah utamanya adalah tingginya tingkat korupsi yang mengikis kepercayaan terhadap lembaga hukum, memperlambat proses penegakan hukum, dan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Selain itu, akses terhadap keadilan masih timpang, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi hambatan biaya tinggi dan minimnya bantuan hukum.

Ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya juga menjadi kendala utama, karena banyak regulasi yang tumpang tindih, tidak selaras, atau tidak diterapkan secara konsisten. Selain itu, kebijakan hukum sering lebih menguntungkan pihak-pihak berkuasa, sehingga hak-hak masyarakat kecil kerap diabaikan. Sistem hukum yang kurang transparan juga membuka peluang untuk praktik korupsi, seperti suap dan kolusi, sehingga makin menjauhkan prinsip keadilan dari pelaksanaannya.

Menurut Ningsih (2023), Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk mendorong terciptanya keadilan sosial di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan reformasi



sosial, politik, dan hukum. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten dalam penyusunan kebijakan dan penegakan hukum.

Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan keadilan hukum. Dengan memperkuat sistem yang berpihak pada rakyat kecil, memberantas korupsi, dan menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel, keadilan sosial dapat semakin mendekati realisasi. Pancasila juga membuka ruang bagi dialog dan gotong royong antarseluruh elemen masyarakat untuk mengatasi tantangan ketimpangan yang masih ada.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi peluang besar untuk mendorong kebijakan yang tidak hanya mencerminkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menurut Ningsih, keberpihakan kepada nilai-nilai Pancasila adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik di masa depan.

Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat. Pancasila memberikan panduan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta pemerataan kesempatan dan akses terhadap pelayanan dasar.

Kesimpulan

Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan ilmu dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Nilai-nilainya memberikan panduan moral dan etis yang relevan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, implementasi nilai-nilai ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan yang konsisten, Pancasila dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar normatif dan etis ilmu pengetahuan sosial; Pancasila berperan sebagai landasan normatif dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Seluruh nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, terutama sila kelima yang merupakan rumusan dari nilai-nilai pembangunan manusia yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi acuan dan pedoman baku terkait pengembangan masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Melalui sila-sila paham ini, individu, komunitas dan lembaga mendapat arah pembangunan baik dalam membentuk sistem yang bersifat merata padat karya, mengentaskan kemiskinan dan memuliakan kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan yang kokoh bagi pencapaian tujuan negara, khususnya dalam menciptakan keadilan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila bukan hanya sebagai alat pembentukan kebijakan, tetapi juga sebagai panduan hidup bersama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, nilai-nilai Pancasila menuntut agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berfokus pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Sila-sila Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia dapat diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, memperbaiki distribusi sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pancasila mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa setiap warga negara mendapat akses yang sama terhadap kesempatan dan keadilan.

Dalam hal ini, Pancasila menjadi pedoman yang menjembatani antara teori dan praktik dalam penerapan ilmu pengetahuan sosial. Nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan keadilan sosial,



JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY

ISSN (ONLINE): 2809-8080. ISSN (PRINT): 2809-9540

<https://ejournalsjp.lkispol.or.id>

Volume 3 Number 5 September 2024

kesetaraan, dan kemanusiaan, dapat menjadi dasar normatif dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial yang berorientasi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai ini dalam berbagai kebijakan publik dan praktek kehidupan sehari-hari akan menjadikan Pancasila sebagai kekuatan penggerak utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Alia Cahya Amala, Laras Radheya, R. A. (2022). *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, 01.
- Aristo Evandy A Barlian, A. D. (2021). *Jurnal Lemhannas RI* 9, 01.
- Ayra Catrina Taufik Putri, D. A. (2023). *Advances In Social Humanities Research* 1, 4, 315-324.
- Hadi, A. (2023). Implementasi Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45-58.
- I Made Kartika, M. L. (2024). *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research* 2, 16.
- Itasari, E. R., & Erwin, E. (2024). Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Cahaya*
- Kaelan, M. (2007). In *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mandalika, 1657-1664. ISSN 2721-4796 (online).
- Juliana Ratnasari Ningsih, F. L. (2023). *Advances In Social Humanities Research* 1, 4, 462-470.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 462-470.
- Restu Gusti Monitasari, E. F. (n.d.). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Hukum* 1, 2, 232245.
- Soekarno. (1945). In *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Arsip Negara.
- Sutanto, B. (2022). Penguatan Nilai Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Pembangunan Sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 32-47.
- Tillar, H. (n.d.). In *Multikulturalisme: Tantangan Globalisasi dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (p. 2003). Jakarta: Grasindp.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.